PARTAI ISLAM DI ERA REFORMASI

Mubarak Dahlan
Universitas Negeri Makassar
Email: mubarakdahlan@unm.ac.id

ABSTRAK

Setelah tahun 1955, masyarakat Indonesia harus menunggu selama 44 tahun untuk menyaksikan contoh lain dari pemilihan parlemen yang bebas dan adil. Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 1999 masyarakat memilih partai politik, bukan individu. Karena tidak ada batasan untuk pembentukan partai-partai politik (sebagai bagian dari program reformasi), Indonesia menyaksikan menjamurnya partai-partai baru. Tidak kurang dari 48 partai diizinkan untuk berpartisipasi dalam Pemilu tahun 1999, meskipun sebagian besar partai-partai ini memainkan peran yang tidak signifikan. Kebanyakan partai politik itu hanya bisa mengandalkan sedikit dukungan saja dari masyarakat. Dalam perpolitikan modern Indonesia, sebuah partai politik pada dasarnya adalah kendaraan politik untuk individu tertentu dan bukan lembaga yang mengekspresikan ideologi atau visi bersama. Karena hanya beberapa orang bisa mengandalkan dukungan publik selama Pemilu 1999, kebanyakan partai politik ditakdirkan untuk menerima sedikit suara

Kata kunci: Partai politik, Reformasi, Sistem Politik

Pendahuluan

Semenjak Presiden Soeharto *lengser keprabon* pada puluhan tahun silam, diskursus mengenai Islam dan Negara Pancasila memasuki pembabakan baru. Jika pada pemerintahan sebelumnya, Islam Politik (kelompok yang menjadikan Islam sebagai ideologi perjuangan dan cita-cita politik) menjadi "target utama" dari agenda deradikalisasi dan depolitisasi Islam, maka era Pos Soeharto ditandai oleh "Revivalisme Islam Politik" baik dalam wujud partai politik maupun gerakan social keagamaan. Kebangkitan itu disusul perjuangan untuk merealisasikan ideo-politik mereka, yakni Negara Syariah. Praktis, kurang lebih dalam kurun sepuluh tahun, kelompok Islam Politik ini berhasil meratifikasi lebih dari 60 peraturan-peraturan daerah yang diinspirasi oleh syariah Islam di berbagai daerah kabupaten/kota di Indonesia.

Upaya kelompok Islam Politik untuk menegakkan syariah di Indonesia dapat dilihat sebagai sebuah upaya untuk menperhadapkan kembali Islam versus Pancasila. Bagi kelompok Islam Politik, Pancasila dianggap sebagai sebuah ideologi yang dimaksudkan untuk menghalangi penerapan syariah Islam di Indonesia. Pandangan ini bersumbu pada nalar kuantitatif bahwa Islam adalah penduduk mayoritas di Indonesia, sehingga penerapan syariat Islam bagi pemeluknya sebagaimana terangkum dalam "tujuh kata" pada Piagam Jakarta, adalah sebuah keniscayaan. Nalar ini tampak mengenyampingkan realitas empiris masyarakat Indonesia yang majemuk di mana koeksistensi agama, suku, ras dan golongan adalah sebuah fenomena yang hidup. Selain itu, di dalam tubuh umat Islam sendiri, nalar kuantitatif Islam Politik ini juga bersifat

imparsial: mayoritas umat Islam (yang diwakili Muhammadiyah dan NU) bersetuju hidup di dalam payung Negara Pancasila (Nubowo, 2015).

Dengan menggunakan perspektif historis, tulisan ini bermaksud memaparkan relasi Islam dan Negara Pancasila pada Era Reformasi. Mengingat membincang relasi keduanya pada masa Reformasi tidak bisa dilepaskan dari masa sebelumnya, maka tulisan ini akan memaparkan secara historis fakta-fakta seputar dinamika dan sikap umat Islam terhadap Negara Pancasila semenjak masa pembentukannya pada 1945 hingga era Reformasi. Selanjutnya, pembahasan akan difokuskan pada ideologi dan proyek syariat yang diusung kelompok Islam Politik di era Reformasi untuk mengganti Negara Pancasila (Nurbowo, 2015).

Proyek syariat yang bergelora saat ini dapat dikatakan sekadar utopia belaka karena berbagai faktor konseptual, praktis dan eksternal yang melatarinya. Untuk itu, perlu reorientasi politik kaum Muslim dari nalar syariatik menuju Islam yang lebih partisipatif dan transformatif dengan menghidupkan kembali basis-basis komunitas keumatan dan kewargaan; masjid, balai desa dan pasar rakyat. Di samping itu terkait juga dengan Politik Islam di Indonesia, juga tak kalah pentingnya dalam membahas Partai Islam pada Era Reformasi. Olehnya itu, penulis akan membahas seluruh permasalahan yang terkait dengan partai islam dari dan hal-hal yang berkaitan dengan sistem kepolitikan di Indonesia dari masa-masa. Pada kesempatan ini, sebelumnya penulis hendak membahas satu persatu tahapan keadaan politik dari masa ke masa setelah pada akhirnya runtuhnya masa orde baru yang digantikan dengan masa Reformasi.

Pembahasan

Sejarah Islam Dalam Politik Indonesia

Berkenaan dengan dinamika demokrasi sebagaimana dijelaskan di atas, perlu kiranya mengetahui perjalanan panjang posisi Islam. Menurut sejarah kemerdekaan Indonesia, Islam merupakan faktor yang sangat strategis dan berperan penting. Mengusung semangat jihad dan penolakan Islam terhadap segala bentuk penjajahan, para ulama di berbagai daerah memobilisasi massa untuk mengusir penjajahan sehingga Indonesia memperoleh kemerdekaan. Hanya saja, seringkali Islam digunakan sebagai alat politik atau manipulasi terhadap masyarakat dan bukan murni untuk perjuangan Islam itu sendiri (Eliraz, 2004 :91). Pada setiap penggalangan massa para tokoh-tokoh agama akan didekati, atau istilah-istilah agama akan keluar dari mulut para pencari kekuasaan.

Ketika dukungan umat Islam berdatangan dan pemerintahan kembali pada posisi stabil atau pemerintahan sudah mulai terbentuk, maka Islam dimarginalkan. Tidak sekadar disingkirkan, bahkan pemerintah seakan memberikan dukungan untuk munculnya *Islamophobia* di tengah masyarakat. Beberapa gerakan Islam dan tokoh-tokoh yang selama ini dikenal "sholeh" ditangkapi, menggunakan perangkat seperti "polisi antiteror". Islam yang pada awalnya diberikan ruang dalam politik Indonesia

pelan-pelan disingkirkan. Awalnya, pasal pertama Pancasila mencantumkan kewajiban untuk melaksanakan syariat Islam bagi para pemeluknya, kemudian bagian tersebut dihapus atas dasar persatuan bangsa (yumitro, 2013)

Kian hari perpecahan umat Islam pada masa Orde Lama kian kentara. Pada waktu itu kelompok Islam terbagi dalam tiga kekuatan politik yaitu Masyumi, NU, dan DI/TII. Masing-masing gerakan politik ini berbeda karakter, Masyumi lebih kritis, sementara NU cenderung bersikap kooperatif dengan pemerintah dan justru mendukung ide NASAKOM yang dikembangkan Soekarno (Azra, 2006: 204). Menurut mereka, kaedah fikih bahwa apabila tidak bisa mendapat semuanya maka memperoleh sedikit sudah mencukupi, berlaku dalam keadaan ini. Atau dalam pepatah tak ada rotan, akar pun jadi. Adapun DI/TII terkenal sebagai gerakan ekstremis yang berusaha untuk mendirikan negara sendiri, terpisah dari NKRI yang berdasarkan syariat Islam (Kimura, 2013: 42).

Kondisi ini membuat pemerintah menganggap Islam sebagai ancaman sehingga Soekarno membubarkan Masyumi. Namun di sisi lain, pemerintah menjadi semakin dekat dengan komunisme (Hasyim, 2010: 189). Belum lagi persoalan berkaitan dengan pemahaman ke-Islaman masyarakat muslim Indonesia yang masih sangat lemah. Mereka memahami agama lebih sebagai simbol ideologis dibandingkan alat dan panduan implementatif. Ketika simbol-simbol agama dipersoalkan akan menyebabkan kemarahan besar, namun saat isi ajarannya diremehkan umat Islam justru turut ambil bagian. Setelah Orde Lama jatuh dan digantikan Orde Baru, posisi Islam kembali diperhatikan. Pemerintah Orde Baru memerlukan dukungan umat Islam dalam upaya melawan komunisme. Muhammadiyah pada waktu itu mendirikan Komando Keamanan Muhammadiyah (KOKAM) dan NU membentuk Barisan Serba Guna (Banser).

Hal ini dapat dimaklumi karena Soeharto sangat menaruh perhatian terhadap legitimasi politik di masa kekuasaannya, salah satunya menggunakan media Islam dan para tokohnya (Tickamyer & Kusujarti, 2012: 43-44). Kemudian setelah posisi Orde Baru semakin kuat, kondisi yang terjadi pada masa Orde Lama terulang kembali. Orde baru memberikan kekuatan politik dan ekonomi yang lebih baik kepada kelompok Kristen, China, dan militer. Kelompok China lebih kuat secara ekonomi dan CSIS yang didirikan oleh Ali Murtopo makin berkembang. Soeharto pun mulai menggunakan pola pembangunan ekonomi sebagai alat penguat legitimasinya. Pada saat yang sama, kelompok Islam yang berjasa bebas bagi Soeharto dalam menghancurkan kekuatan PKI menjadi termarginalkan (Hua, 2009: 198).

Lahirnya Organisasi Keislaman Modern Syarikat Islam

Sebelum terbentuknya partai politik di Indonesia, terlebih dahulu penulis akan memaparkan bagaimana berdirinya organisasi keislaman di Indonesia. Syarikat Islam sendiri dilahirkan di Solo pada tanggal 16 Oktober 1905 dengan sifat nasional dan dasar Islam yang tangguh. SI adalah organisasi Islam yang terpanjang dan tertua umurnya dari semua organisasi massa di tanah air. Sifat *nasional* itu untuk

membedakannya dengan *regional*, lokal kedaerahan seperti yang dianut oleh Budi Utomo. Dengan sifat nasionalnya itu, Syarikat Islam meliputi seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Lihatlah para tokohnya seperti Samanhudi, Cokroaminoto berasal dari Jawa Tengah dan Timur. Agus Salim dan Abdoel Moeis berasal dari Sumatera Barat, dan A.M. Sangadji dari Maluku (Armansyah, 2017).

Lebih lanjut Firdaus A.N menyatakan bahwa sebenarnya Syarikat Islamlah yang pertama dan berperan besar dalam menyatukan bangsa Indonesia bukan organisasi Budi Utomo. Hal ini dapat dilihat dari komentar dari Hamid Algadri, Ketua Perintis Kemerdekaan Indonesia dalam wawancaranya dengan Republika tentang Budi Utomo yang menyatakan seperti ini: "Sebetulnya ketika Budi Utomo berdiri kita akan tahu mereka murid-murid Belanda yang tidak tahu banyak tentang sejarah Islam. Bahkan pergerakan nasionalis mula-mula itu anti Islam dan anti Arab". (Republika, 23-8-1996).

Berdirinya Syarikat Islam sebenarnya menunjukkan eksistensi umat Islam dan sangat wajar apabila organisasi ini dapat berperan sampai sejauh itu karena berbagai basis kekuatan politik Indonesia adalah umat Islam itu sendiri yang tersebar di berbagai pelosok Nusantara. Langkah ini dapat menemukan akomodasinya ketika pada saat itu umat Islam tidak memiliki wadah perjuangan yang terorganisir dengan baik. Syarikat Islam menjadi jawaban atas problematika penindasan kaum penjajah. Dari organisasi ini akhirnya lahir Serikat Dagang Indonesia (SDI) yang lahir di Solo pada 1911. Organisasi dagang ini merupakan usaha untuk menandingi dominasi pengusaha Tionghoa yang memiliki kedekatan dengan pemerintah Hindia Belanda.

Reorientasi Politik Islam

Fenomena kegagalan Islam Politik, tampaknya, bukan kekhasan Indonesia. Penggulingan Presiden Mesir Mohammad Mursi, tokoh Ikhawanul Muslimin, pada 1 Juli 2013 menjadi contoh menarik. Selama 1 tahun berkuasa, pemerintahannya terjebak pada nalar syariatik, yakni mengganti Konstitusi lama dengan Konstitusi Syariah. Padahal, bukan syariah yang menjadi jawaban krisis multidimensional pasca penggulingan Presiden Hosni Mubarak dua tahun lalu. Kebijakan-kebijakan Morsi yang syariatik dijawab oleh ketidakpuasan rakyat dengan kudeta militer (Nubowo, 2015).

Reformasi dan demokrasi di Indonesia juga menguak mitos nalar syariatik dari Islam Politik. Jika pada masa Orde Baru, mitos '*Islam is one and only solution*' menjadi mimpi yang harus direalisasikan, maka Reformasi memungkinkan realisasi mitos tersebut dan sekaligus melanjutkannya. Mimpi mitologis syariah ternyata tidak seperti yang dimitoskan sebelumnya: ia telah gagal merealisasikan gagasan-gagasan syariatik dalam sistem kehidupan yang lebih menyejahterakan. Sebaliknya, seperti dibahas dimuka, nalar syariatik terjebak pada *conflicts of interest* para pengusungnya sendiri, dan juga ketidakberterimaan mayoritas publik Muslim terhadap gagasan Negara Syariat.

Selain itu, ini yang paling substantif, Islam Politik gagal mentransformasikan nalar syariatik dalam sistem dan institusi politik yang lebih baik,²⁰ karena terjebak pada konsepsi fikih abad pertengahan Islam. Akibatnya, partai politik Islam dan produk perda-perda syariah tidak dapat menjawab persoalan keseharian rakyat, seperti pengangguran, problem perumahan, urbanisasi, kemiskinan, rendahnya indeks prestasi SDM, kasus korupsi, kolusi dan nepotisme, HAM, problem gender, dan sebagainya. Diperparah oleh instrumentalisasi Islam untuk tujuan-tujuan elektoralis, Islam dan syariah menjadi tidak 'berdaya tarik' di mata publik Muslim sendiri.

Kiprah politik Islam di panggung kekuasaan Indonesia banyak mengalami pasang surut. Masa awal Orde Baru sampai akhir tahun 1980-an bisa dikatakan bahwa politik Islam di Indonesia banyak berada di luar arena kekuasaan. Keadaan seperti Situasi ini mulai mengalami perubahan pada akhir tahun 1970-an, hal ini disebabkan oleh kebangkitan secara menyeluruh (*holistic revival*) yang terjadi di kalangan Islam pada akhir 1970-an. Kebangkitan Islam pada bagian akhir tahun 70-an dan 80-an tersebut berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang cenderung mengakomodasi aspirasi umat Islam.

Pada akhir 1980-an Suharto dengan para pembantunya mulai merangkul kalangan Muslim, puncak bulan madu antara pemerintah dengan Islam terjadi pada tahun 1990 yaitu ketika Presiden Suharto pada tanggal 6 Desember 1990 memukul bedug sebagai tanda secara resmi dibukanya Kongres Nasional I ICMI di Malang Jawa Timur. Pendirian ICMI ini mempunyai dampak besar terhadap wacana politis maupun ideologis pada tahun 1990-an. Namun bulan madu tersebut tidak berlangsung lama karena kemudian Suharto turun dari kekuasaannya. Pada masa post Suharto bermunculan partai politik yang berasaskan Islam yaitu: Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bulan Bintang, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, dan Partai Bintang Reformasi. Ciri khas perjuangan Politik Islam Post Suharto banyak ditandai dengan keinginannya untuk memberlakukan Syariat Islam di Indonesia (Soekanto, 2008).

Dengan berkembangnya gerakan Islam kultural pada masa Orde Baru, banyak pengamat menilai bahwa kekuatan Islam politik tidak akan muncul lagi. Apalagi setelah PPP sebagai satu-satunya representasi kekuatan Islam politik sudah menanggalkan asas Islam dan menerima asas Pancasila. Taufik Abdullah mengatakan bahwa dengan PPP menerima Pancasila sebagai asasnya maka hal itu merupakan "halaman akhir Islam politik di Indonesia". Dengan analisis yang berbeda namun dalam format yang sama dinyatakan pula oleh R. William Liddle dalam tulisannya yang berjudul *Skripturalisme Media Dakwah*. Dalam tulisan ini ia mengemukakan tesis bahwa kelompok skripturalisme (kelompok Islam formalistik) tidak akan berkembang, hal ini karena ada tiga hambatan yang akan dihadapi, yaitu: (1) komunitas abangan, yang meski semakin sedikit namun masih tetap vital; (2) santri tradisional yang tetap akomodisionis, dan (3) kalangan modernis sendiri (Romli, 2004).

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia pasca Orde Baru, akibat gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa, telah terjadi ledakan partisipasi politik. Ledakan partisipasi politik itu bukan hanya menimpa kalangan masa akar rumput tetapi juga menghinggapai kalangan elite politik. Sebagai perwujudan dari ledakan partisipasi politik itu, para elite politik berlomba-lomba mendirikan atau menghidupkan kembali partai politik, tak terkecuali elite Islam. Partai-partai politik Islam yang muncul pada era reformasi ini mencapai 32, dan dari jumlah tersebut yang lolos Pemilu 1999 sebanyak 17 partai, yaitu PPP, PBB, PK, PUI, PSH, PSII 1905, PNU, PKU, Partai Politik Islam Masyumi, PMB, PAY, PID, PDB, KAMI, PP, PUMI, dan Partai SUNI. Fenomena berdirinya partai-partai politik, khususnya yang berbasis Islam, dianggap sebagai bangkitnya politik aliran. Dikatakan sebagai bangkitnya kembali politik aliran karena selama Orde Baru, politik aliran diberangus.

Pada masa itu, rezim Orde Baru melakukan kebijakan dealiranisasi dengan serangkaian kebijakan: depolitisasi massa, *floating mass*, dan de-ideologisasi dengan memberlakukan Pancasila sebagai asas tunggal. Kini setelah rezim Orde Baru jatuh, aliran-aliran politik itu, termasuk aliran politik Islam, bangkit kembali dengan wujud berdirinya partai-partai politik Islam. Sehubungan dengan itu, Th. Sumartana mengemukakan beberapa hal yang menyebabkan munculnya partai politik berdasarkan agama. *Pertama*, karena agama itu sendiri memiliki dukungan teologis untuk mencapai cita-cita berdasarkan gagasan-gagasan keagamaan yang dipercayai. *Kedua*, karena ikatan politik dari para warganya menyebabkan agama sebagai faktor pengikat untuk mendukung pemimpin dari kelompok agama tersebut. *Ketiga*, karena umat agama tersebut merasa lebih nyaman dengan pemimpin politik yang lahir dari komunitasnya sendiri dan tidak percaya manakala politik dikuasai oleh golongan agama lain.

Pemikiran Pendirian Partai-Partai Islam

Partai Islam yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah, suatu perkumpulan yang seases, sehaluan dan setuju. Dengan demikian, Partai Islam merupakan perkumpulan atau golongan yang menjadikan agama Islam sebagai asas partai. Menjelang kemerdekaan Indonesia, para pemimpin Islam ketika itu tidaklah mementingkan berdirinya suatu negara yang berdasarkan Islam, tetapi yang terpenting adalah kemerdekaan Indonesia. Hal ini disebabkan karena pemikiran pemimpin-pemimpin Islam pada saat itu didasarkan pada penduduk bangsa Indonesia yang sebagian besar beragama Islam, yang menurutnya jumlah yang mayoritas agama Islam itu tentu akan membentuk negara Indonesia yang berdasarkan Islam dan pemerintah yang beragama Islam (Ikrar, 2003).

Dengan perkataan lain pemikiran pada saat itu adalah bahwa Indonesia setelah merdeka akan otomatis menjadi negara yang berdasarkan Islam. Hal lain yang menjadi kendala dalam pendirian negara Islam adalah dalam percaturan sejarah umat Islam, cita-cita untuk mendirikan negara Indonesia yang berdasarkan Islam bukan hal yang mudah untuk diwujudkan. Hal ini disebabkan, bukan saja tantangan yang berasal dari

partai Islam sendiri, juga munculnya partai-partai nasional sekuler yang menjadi penghambat. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan sejarah partai-partai Islam sebelum dan sesudah kemerdekaan. Sarekat Islam yang merupakan parta Islam yang pertama di Indonesia telah memberikan sumbangan dalam kehidupan politik Indonesia pertama kali yang harus dilihat dari perjuangan organisasi Sarekat Islam (SI), sebagai partainasional yang besar yang pertama dalam programnya tidak menyebut-nyebut negara Islam, yang dituntut adalah kemerdekaan Indonesia. Serikat Islam (SI) didirikan alas dua alasan : (1). Kompetisi yang makin meningkat dalam perdagangan baik, terutama dengan golongan Cina sehubungan dengan berhasilnya revolusi Cina pada tahun 1911. (2). Adanya tekanan dari masyarakat Indonesia, yaitu dari Bengawan Solo. Sehingga lewat pertemuan Solo pada tanggal 11 November 1912. 51) diubah menjadi Serikat.

Partai Politik Islam Pasca Reformasi

Ledakan partisipasi pendirian partai Islam ini bersifat sesaat hanya terjadi di pemilu pertama era reformasi di tahun 1999, untuk pemilu berikutnya di tahun 2004, 2009 dan 2014 jumlah partai politik Islam mengalami penurunan secara signifikan, tercatat hanya lima partai Islam yang masih tetap bertahan diantaranya Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang akan penulis deskripsikan satu persatua di bawah ini Partai Amanat Nasional merupakan parti berbasis massa Islam yang didirikan oleh Amien Rais (Mantan Ketua PP Muhammadiyah), PAN dideklarasikan pada tanggal 23 Agustus 1998 di Istora Senayan Jakarta, yang dihadiri sekitar 15 ribu orang, partai berlogo matahari ini menetapkan basis massanya dari kalangan Islam modernis (Muhammadiyah). Meski berbasiskan umat Islam perkotaan, PAN mendeklarasikan diri sebagai partai terbuka dengan menggunakan asas Pancasila yang menghargai kemajemukan, pluralisme dan keadilan sosial. Partai ini beranggotakan warga negara Indonesia yang berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda baik dari pemikiran, etnis dan agama (Argenti dan Rifai, 2014).

Menurut Amien Rais, penggunaan asas Pancasila sebagai ideologi PAN, dilandasi oleh tiga alasan. *Pertama*, karena alasan teologi, dalam Islam (Al-Qur'an) menurutnya tidak ada satu ayat ataupun hadis dari Nabi Muhammad SAW yang mengharuskan mendirikan negara Islam. *Kedua*, alasan bersifat rasional, yakni tidak ada catatan dalam sejarah nasional yang menceritakan kemenangan partai Islam semenjak berdirinya republik Indonesia, dalam arti memperoleh suara mayoritas ketika kontestasi pemilu, baik pada masa Orde Lama ataupun Orde Baru. *Ketiga*, untuk mengayomi serta melindungi kalangan minoritas yang senantiasa dihinggapi ketakutan ketika umat Islam mendirikan partai Islam. Bagi Amien Rais konsep negara Islam harus ditolak, karena tidak ada perintahnya dalam Al-Qur'an dan Hadist, lebih penting menurutnya negara harus menjalankan etika Islam, yang menegakan keadilan sosial jauh dari eksploitasi

satu golongan atas golongan lain, apakah arti negara Islam bersifat formalis, tetapi tidak mampu menghadirkan ruh Islam dalam menjalankan kekuasaannya.

Visi dan misi PAN dibawah kepemimpinan Hatta Rajasa, ingin menjadikan PAN sebagai partai yang profesional, menjadikan setiap program politiknya menjadi solusi dari tiap masalah yang muncul di tengah masyarakat, maka menjelang pemilu 2014, PAN menawarkan program untuk membuka akses setiap masyarakat pada sumber-sumber kemakmuran, untuk mewujudkan itu PAN menawarkan reformasi agraria, yang dipahami bukan sekedar bagi-bagi lahan, tetapi pertama-tama untuk melindungi kepentingan masyarakat dari kartel penguasa impor pangan. Menurut Hatta Rajasa, petani Indonesia harus berkebudan ditanahnya sendiri, keadilan atas tanah harus diwujudkan, dengan menolak kartel asing menguasai pangan yang merupakan hajat hidup orang banyak. Selain itu PAN membuat program kesehatan, dengan berusaha memperbaiki pelayanan sistem BPJS untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

BPJS merupakan bentuk dari hadirnya negara dalam melindungi serta mem-*protect* sebagian masyarakat (*the poor*). Dari narasi singkat tentang PAN diatas, terlihat bahwa arah ideologi PAN semakin ketengah, dengan program-program yang ditawarkan kepada publik lebih bernuasa strategis, tidak lagi bersifat ideologis (Islam), terlebih dibawah kepemimpinan Hatta Rajasa, partai yang didirikan Amien Rais ini selalu menjadi bagian dari pemerintahan dari kubu nasionalis (Partai Demokrat). Kesimpulannya adalah Partai-partai Islam ini senantiasa menjadi bagian dari koalisi di dalam pemerintahan, sehingga selama era reformasi relasi Islam politik dengan negara bersifat harmonis dan akomodatif. Terakhir, selama reformasi ini relasi Islam politik didominasi relasi yang bersifat subtansi, ini dibuktikan dengan masuknya seluruh partai-partai Islam ke dalam pemerintahan, masuknya partai-partai Islam ke dalam pemerintahan menandakan wajah Islam politik yang akomodatif dan pragmatis (Argenti, 2014).

Kesimpulan

Problem utama pasca reformasi dewasa ini, meminjam pendapat Nurcholish Madjid bahwa reformasi belum menghasilkan peradaban *civil society* yang menjadi landasan demokrasi. Masyarakat berperadaban baru tidak bakal terwujud apabila hukum tidak ditegakkan secara adil. Rasa keadilan itu harus dimulai dari ketulusan komitmen pribadi. Karena itu peradaban baru membutuhkan pribadi-pribadi yang tulus yang mengikatkan jiwanya kepada wawasan keadilan. Untuk menggapai ketulusan keadilan para elit politik harus memiliki visi jauh ke depan, dan tidak menjadikan diri mereka sebagai tawanan dalam situasi ruang dan waktu. Elit politik adalah *public figure* yang sudah seharusnya memiliki pijakan etika dan moral politik, bahkan dalam diri mereka tersembul jiwa dan semangat keterbukaan. Ketiga aspek secara imperatif harus dimiliki oleh *public figure*. Ketiga aspek itu akan bermutasi menjadi mata air keteladanan bagi seluruh komponen masyarakat, dan pada akhirnya ketiga aspek itu

menjadi landasan untuk membangun peradaban baru, yakni demokrasi atau *civil society*.

Dengan demikian demokrasi atau *civil society* tidak mungkin terwujud apabila kaum elit politik tidak memiliki ketulusan dalam membangun kehidupan yang lebih adil, dengan berpijak pada etika dan moral politik, serta keterbukaan terhadap kebijakan publik yang ditempuh. Dalam perspektif ini Mochtar Pabottingi menyebutkan empat modal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin atau elit politik dalam kepemimpinannya atau kenegarawannya, yakni: (1) memiliki sifat terpuji, (2) berperilaku baik, (3) sikap bertanggung jawab terhadap kebijakan yang sudah ditempuh, dan (4) ketercerahkan pemikiran kaum elit politik berdasarkan pada tujuan hidup luhur atau visi ke depan demi kemaslahatan masyarakat bangsa maupun negara. Keempat faktor itu menjadi posisi sentral, bahkan sangat imperatif, bahkan posisi empat faktor di atas memacu terwujudnya demokrasi atau *civil society*.

Ti adanya empat aspek itu dalam kehidupan politik masa reformasi justru memacu bangkrutnya kepemimpinan partai politik. Ada dua segi memacu kebangkrutan kepemimpinan elit politik dewasa ini: Kebangkrutan personal akibat tindakan politik yang dilakukan terindikasi tidak terpuji, misalnya tindakan koruptif secara pribadi maupun berjamaah, menghamburkan dana APBN untuk mendapat pembagian prosentase dari dana moral politik, bahkan dalam diri mereka tersembul jiwa dan semangat keterbukaan. Ketiga aspek secara imperatif harus dimiliki oleh *public figure*. Ketiga aspek itu akan bermutasi menjadi mata air keteladanan bagi seluruh komponen masyarakat, dan pada akhirnya ketiga aspek itu menjadi landasan untuk membangun peradaban baru, yakni demokrasi atau *civil society*.

Melihat kondisi partai politik Islam pasca reformasi yang begitu lebar dan besar variannya, dan ada kecenderungan elit politik partai politik Islam belum 100 persen menjadikan ideologi Pancasila sebagai *philosophische grondslag*, tentu, dapat memicu rendahnya partisipasi pemilih. Partai politik Islam yang banyak variannya itu, perlu ditumbuhkan sebuah gagasan untuk menyederhanakan jumlah partai politik Islam. Keberhasilan Soeharto menyederhanakan partai politik menjadi tiga *mainstream* politik, yakni sosial- demokrat (Golkar), nasionalis (PDI), dan Islam (PPP) merupakan keberhasilan Soeharto yang harus diacungi jempol. Bila tiga *mainstream* politik itu dihidupkan kembali dalam bentuk baru, dan diletakkan pada fase lima belas tahun reformasi, saya sangat meyakini bahwa partisipasi pemilih terhadap partai politik Islam akan berbanding lurus dengan kekuatan pemilih mayoritas beragama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Andar Nubowo, 2015. **Islam dan Pancasila di Era Reformasi: Sebuah Reorientasi Aksi** *JURNAL KEAMANAN NASIONAL* Vol. I No. 1. Hal. 69 - 70
- Argenti dan Mulana Rifai, 2014 **Islam Politik Era Refomasi Pergulatan Ideologi Partai Politik Islam Antara Formalis dan Subtansi**. *Jurnal ilmiah Solusi* Vol. 1 No. 4. Hal. 13

Armansyah, Yudi: **Dinamika Perkembangan Islam Politik di Nusantara**. Fokus: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol. 2, No. 01, 2017 Hal. 34 - 35

Dr. Sokamto, 2008. **DINAMIKA POLITIK ISLAM DI INDONESIA** (Dari Masa Ode Baru Sampai Masa Reformasi). ENLIGHTENMENT. Bandung. Hal. 23

Gonda Yumitro, 2013. Partai Islam dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia. Diterbitkan oleh Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Volume 17, Nomor 1. Hal. 39. ISSN 1410-4946

Hermanu Joebagio. 2016. **MEMBACA POLITIK ISLAM PASCA REFORMASI (JURNAL AGASTYA)** Vol. 6 No. 1 Januari. Hal. 5

Ikrar, 2003. **PARTAI PARTAI ISLAM DI INDONESIA** (Latar Belakang Dan Dinamika Perjalanannya). Jurnal Jurnal Al-Syir'ah Vol. 1 No. 2. Hal 5

Romli. 2004. *Partai Islam dan Pemilih Islam di Indonesia*. Volume 1 Nomor 1. Hal. 35